



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

AKSELERASI PEMULIHAN INDUSTRI OTOMOTIF 2026

Jeffrey Ivan Vincent
Analisis Legislatif Ahli Pertama
jeffrey.vincent@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah merampungkan skema insentif otomotif 2026 sebagai langkah pemerintah mendukung industri otomotif yang dalam dua tahun terakhir menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain melemahnya daya beli masyarakat, ketidakpastian pasar global, serta transisi menuju kendaraan listrik yang menuntut biaya besar dan teknologi baru. Di sisi lain, melemahnya daya beli masyarakat mengakibatkan sejumlah pabrik kesulitan mengoptimalkan kapasitas produksi akibat menurunnya permintaan, sementara ketergantungan pada impor komponen dan material penting membuat biaya produksi terus meningkat. Perubahan kebijakan terkait insentif dan kendaraan rendah emisi juga menuntut kepastian agar pelaku industri dapat merancang strategi usaha secara lebih terarah. Oleh karena itu, insentif yang akan diterapkan pada 2026 dirancang untuk memperkuat pasar otomotif, menjaga keberlanjutan investasi, dan memastikan sektor ini tetap menjadi penggerak utama ekonomi nasional.

Insentif otomotif 2026 disiapkan sebagai kebijakan fiskal komprehensif, yang mencakup sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, pemerintah menargetkan peningkatan daya beli masyarakat melalui keringanan pajak dan skema subsidi untuk menurunkan biaya pembelian kendaraan, khususnya pada segmen yang menjadi tulang punggung pasar otomotif seperti *Low Cost Green Car* (LCGC) dan kendaraan listrik. Penurunan daya beli, ketatnya pembiayaan lembaga keuangan, serta meningkatnya kredit macet (*non-performing loan*) menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya kontraksi pasar. Hal ini tercermin dari penurunan penjualan *wholesale* sebesar 10,6% hingga Oktober 2025. Pelaku industri, termasuk Daihatsu dan Honda, menilai bahwa insentif fiskal dapat menjadi katalis penting dalam memulihkan permintaan pasar. Mereka menekankan bahwa penurunan permintaan tidak semata soal harga, tetapi juga berkaitan dengan sentimen konsumen dan kelonggaran program pembiayaan.

Dari sisi penawaran, Kemenperin menekankan pentingnya menjaga utilisasi produksi dan keberlanjutan investasi industri. Penurunan permintaan dari pabrikan kendaraan membuat banyak produsen komponen mengurangi produksi, sehingga insentif 2026 juga diarahkan untuk memperkuat industri hulu dan komponen. Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) mengusulkan agar insentif difokuskan pada kendaraan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 60%. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga struktur industri otomotif domestik, meningkatkan daya saing, dan mencegah berpindahnya investasi ke negara lain. Kebijakan fiskal 2026 diproyeksikan melanjutkan transisi menuju kendaraan rendah emisi, sejalan dengan program elektrifikasi nasional yang telah berjalan. Saat ini, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik berlaku hingga 2025, dan pemerintah tengah mempertimbangkan penyempurnaan skema tersebut untuk periode berikutnya. Pakar otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menekankan bahwa elektrifikasi harus diiringi peningkatan TKDN agar produksi kendaraan listrik di dalam negeri lebih kompetitif dan tidak bergantung pada impor utuh (*Completely Built Up/CBU*). Dengan demikian, mobil listrik lokal dapat bersaing sekaligus menjaga keberlanjutan investasi.

Dalam aspek kebijakan, Kemenperin menegaskan bahwa perumusan insentif dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), serta asosiasi industri lain untuk memastikan kebijakan tepat sasaran. Pemerintah menekankan bahwa fokus utama kebijakan ini adalah melindungi tenaga kerja dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan kapasitas produksi, ekspansi pasar, dan percepatan investasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat daya saing industri otomotif Indonesia dalam jangka panjang.

Atensi DPR

Komisi VII DPR RI dapat mengambil langkah strategis untuk memastikan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mampu menjalankan skema insentif otomotif 2026 secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Transparansi peta jalan program menjadi kunci agar insentif benar-benar menjawab tantangan struktural industri, seperti melemahnya daya beli, rendahnya utilisasi pabrik, dan tingginya ketergantungan pada komponen impor. Komisi VII DPR RI juga dapat mendorong Kemenperin memperkuat koordinasi lintas kementerian agar desain insentif selaras dengan kebijakan elektrifikasi nasional serta mendorong peningkatan TKDN. Selain itu, Komisi VII DPR RI dapat memfasilitasi dialog dengan asosiasi industri, akademisi, dan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, Kemenperin diharapkan mampu memperluas program yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan rantai pasok domestik, sehingga insentif tidak hanya memulihkan pasar dalam jangka pendek, tetapi juga meningkatkan daya saing industri otomotif Indonesia secara berkelanjutan.

Sumber

kontan.id, 20 November 2025;
rm.id, 19 November 2025;
voi.id, 15 November 2025; dan
wartaekonomi.co.id, 14 November 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*